

Perkembangan Pembangunan Kabupaten Rokan Hilir Masa Bupati Annas Maamun (2006-2014)

Nuraina¹ Isjoni² Yuliantoro³

Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau,
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia^{1,2,3}

Email: nuraina1497@student.unri.ac.id¹ isjoni@lecturer.unri.ac.id²
yuliantoro@lecturer.unri.ac.id³

Abstract

This study aims to reconstruct the development progress of Rokan Hilir Regency during the leadership of Regent H. Annas Maamun (2006–2014). The research was conducted in Bagansiapiapi, the capital city of Rokan Hilir, using a historical method with a qualitative descriptive approach. Data collection techniques included observation, interviews, documentation, and literature study. The findings show significant improvements in government infrastructure, regional economic growth, educational access, and social cohesion among ethnic groups. One of the major achievements was the transformation of Batu Enam into an integrated government center and the cultural preservation efforts seen in the Bakar Tongkang Festival. This study contributes to local historiography and provides a foundation for future culture-based development policy.

Keywords: Regional Development, Local History, Infrastructure, Multiethnic Society

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi perkembangan pembangunan Kabupaten Rokan Hilir selama masa kepemimpinan Bupati H. Annas Maamun (2006–2014). Penelitian ini dilakukan di Bagansiapiapi, ibukota Kabupaten Rokan Hilir, menggunakan metode historis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan signifikan dalam pembangunan infrastruktur pemerintahan, pertumbuhan ekonomi daerah, perluasan akses pendidikan, dan penguatan kohesi sosial lintas etnis. Salah satu capaian penting adalah transformasi kawasan Batu Enam menjadi pusat pemerintahan baru yang terintegrasi dan pelestarian budaya lokal melalui Perayaan Bakar Tongkang. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap historiografi lokal dan menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan pembangunan berbasis budaya.

Kata Kunci: Pembangunan Daerah, Sejarah Lokal, Infrastruktur, Masyarakat Multietnis



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas. Dengan luasnya negara ini menyebabkan masyarakatnya terbagi menjadi beberapa kelompok, baik kelompok yang besar maupun kelompok yang kecil, yang hal tersebut dikenal dengan masyarakat yang multicultural, terdiri dari berbagai ras, agama, etnis, suku, bahasa dan lainnya. Menelusuri kota Bagansiapiapi erat kaitannya dari sejarah Kabupaten Rokan Hilir. Dahulu terdapat 3 wilayah yang menjadi pusatnya pada saat itu, yakni negeri Kubu, Bangko, dan Tanah Putih. Yang masing masing dipimpin oleh seorang kepala wilayah yang bertanggung jawab kepada kesultanan Siak. Setelah kemerdekaan Indonesia, 3 wilayah yang mencakup Kubu, Bangko, dan Tanah Putih tersebut digabungkan kedalam Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Kemudian pada tanggal 4 oktober 1999 diputuskan sebuah kabupaten baru di Provinsi Riau Sesuai UU RI Nomor 53 tahun 1999 dengan ibukota pertama yakni Ujung Tanjung. Sejalan dengan perkembangannya yang awal mulanya Ujung Tanjung menjadi ibukota dari

Kabupaten Rokan Hilir, tetapi karena terdapat beberapa permasalahan sehingga ibukota Rokan Hilir berganti menjadi Bagansiapiapi. Dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 ditetapkan Bagansiapiapi sebagai Ibukota Kabupaten Rokan Hilir. Dengan pusat pemerintahan berada di kompleks Perkantoran Batu Enam. Bagansiapiapi merupakan ibukota dari kabupaten Rokan Hilir. Disana menjadi pusat pemerintahan bagi wilayah yang dijuluki Negri Seribu Kubah ini. Wilayah dengan potret kerukunan antar sukunya sangat terlihat jelas. Dimana terdapat banyak sekali suku yang menempati wilayah ini, sebut saja ada suku melayu yang menjadi suku mayoritas disana, ada suku jawa, suku minang, suku batak, suku nias, suku bugis, dan ada pula Etnis Tionghoa yang merupakan pengagas perkembangan kota Bagansiapiapi. Suku Melayu dan Etnis Tionghoa merupakan 2 kelompok masyarakat yang menguasai kota Bagansiapiapi.

Bupati Annas Maamun pernah menjabat menjadi orang nomor 1 di Rokan Hilir. Yakni ia merupakan bupati Rokan Hilir selama 2 periode, terhitung mulai tahun 2006-2014. Ia merupakan sosok yang di kagumi oleh masyarakat Rokan Hilir. Bagansiapiapi menjadi potret kehidupan yang saling bergantung antar suku. Dalam masa kepemimpinannya Bupati H. Annas Maamun mampu mewujudkan itu. Bagansiapiapi yang terkenal dengan keberagamannya baik itu dari suku, kebudayaan, bahasa dan lainnya. Dibawah pengaruhnya Bagansiapiapi yang merupakan Ibukota dari Rokan Hilir berubah signifikan. Terdapat banyak perubahan terutama banyaknya pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hilir kepada Bagansiapiapi. Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari strategi pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Pemerintah daerah, sebagai ujung tombak pelaksanaan otonomi daerah, memiliki peran penting dalam merancang dan melaksanakan kebijakan pembangunan sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal. Kabupaten Rokan Hilir sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Riau turut menjalankan fungsi ini, terutama sejak terbentuk sebagai kabupaten mandiri pada tahun 1999. Seiring perjalanan waktu, pembangunan daerah ini mengalami percepatan yang signifikan, khususnya pada masa jabatan Bupati H. Annas Maamun. Periode 2006-2014 menjadi tonggak penting bagi perubahan wajah fisik dan administratif wilayah tersebut.

Dalam konteks pembangunan Kabupaten Rokan Hilir, kepemimpinan Bupati Annas Maamun menandai era akselerasi pembangunan infrastruktur. Infrastruktur (*infrastructure*), menurut definisi *Oxford Dictionaries* adalah struktur fisik dan organisasi dasar (seperti bangunan, jalan, pasokan energi) yang diperlukan untuk beroperasinya masyarakat dan institusi (Mulyo.S, dkk. 2018). Terdapat banyak pembangunan infrastruktur pada masa Bupati Annas Maamun, seperti, lewat kebijakan Maamun Pembangunan gedung-gedung pemerintahan yang megah, perbaikan fasilitas jalan, peningkatan pelayanan publik, serta penataan kawasan strategis menjadi program prioritas pemerintahannya. Salah satu ciri khas dari pembangunan era ini adalah penggunaan arsitektur kubah putih pada berbagai bangunan pemerintahan, yang tidak hanya memiliki fungsi struktural, tetapi juga menjadi simbol identitas daerah. Kawasan Batu Enam sebagai pusat pemerintahan yang baru pun dirancang dengan gaya yang mencolok dan seragam, memperlihatkan semangat baru dalam membangun citra Kabupaten Rokan Hilir yang lebih modern dan berwibawa. Alhasil, kawasan pemerintahan Batu Enam Bagansiapiapi yang diresmikan pada 2009 pun menjadi tempat eksperimen Maamun untuk membangun identitas Rokan Hilir yang hendak di usung (Aprian.R.D, dkk. 2022)

Pembangunan fasilitas publik atau pembangunan Infrastruktur tentu memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat, baik dari pembangunan Perekonomian, Pendidikan dan ataupun Sosial budaya yang ada dalam masyarakat Kabupaten Rokan Hilir.

Dari sisi historis, masa jabatan Annas Maamun menjadi periode yang patut dicatat dalam kronik pembangunan Kabupaten Rokan Hilir. Dokumentasi terhadap perkembangan infrastruktur dan kebijakan publik yang diambil selama masa ini belum banyak dilakukan secara sistematis. Oleh karena itu, penting untuk merekonstruksi jejak pembangunan tersebut agar menjadi bagian dari sejarah lokal yang dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Catatan sejarah seperti ini juga dapat menjadi sumber pembelajaran yang berguna dalam mengevaluasi peran pemerintah daerah dalam membangun daerahnya, sekaligus sebagai bahan refleksi terhadap kebijakan yang telah diambil.

Kajian tentang perkembangan pembangunan daerah pada masa jabatan kepala daerah tertentu, seperti yang dilakukan dalam penelitian ini, memiliki relevansi tinggi dalam konteks studi sejarah kontemporer dan kebijakan publik. Hal ini menunjukkan keterkaitan antara kepemimpinan, kebijakan, dan hasil pembangunan yang nyata di lapangan. Dalam kasus Rokan Hilir, Bupati Annas Maamun menjadi aktor sentral dalam arah pembangunan yang diambil, dan hal ini berdampak pada bentuk fisik kota, pola kehidupan masyarakat, hingga citra daerah. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memberikan gambaran utuh tentang bagaimana kepemimpinan daerah dapat membentuk narasi pembangunan dalam kerangka sejarah lokal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merekonstruksi sejarah pembangunan Kabupaten Rokan Hilir pada masa pemerintahan Bupati H. Annas Maamun (2006–2014). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara deskriptif mengenai kondisi Kabupaten Rokan Hilir sebelum masa kepemimpinan Bupati Annas Maamun, dan menjelaskan mengenai perkembangan Kabupaten Rokan Hilir pada masa kepemimpinan Bupati Annas Maamun, serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat Rokan Hilir, khususnya di kota Bagansiapiapi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian sejarah lokal, serta sebagai sumber informasi yang dapat digunakan oleh generasi muda dan peneliti lainnya untuk memahami proses pembangunan daerah berbasis nilai budaya dan identitas lokal.

Dengan demikian, artikel ini tidak hanya mengangkat dimensi fisik dari pembangunan daerah, tetapi juga menyoroti sisi sosial dan kultural yang menyertainya. Pendekatan sejarah lokal yang digunakan dalam penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah historiografi Indonesia, khususnya dalam memahami dinamika pembangunan di daerah multikultural seperti Rokan Hilir. Melalui penelitian ini, diharapkan masyarakat, terutama generasi muda, dapat memahami bahwa pembangunan tidak hanya berbicara soal fisik semata, tetapi juga melibatkan aspek nilai, simbolisme, dan makna budaya yang melekat di dalamnya. Penelitian ini juga menjadi penting dalam konteks pendidikan, karena dapat digunakan sebagai materi pembelajaran sejarah lokal yang kontekstual, relevan, dan bermakna bagi siswa di wilayah Riau maupun secara nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan historis yang bertujuan untuk merekonstruksi peristiwa masa lalu secara sistematis, akurat, dan objektif. Pendekatan historis dipilih karena penelitian ini berfokus pada perkembangan pembangunan Kabupaten Rokan Hilir selama masa jabatan Bupati H. Annas Maamun (2006–2014). Metode ini mencakup proses pencarian, pengumpulan, verifikasi, interpretasi, dan penulisan ulang fakta sejarah yang relevan dengan topik penelitian (Suprpto, 2013). Kajian dilakukan dengan memanfaatkan pendekatan normatif dan interpretatif terhadap sumber-sumber sejarah primer maupun sekunder. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Bagansiapiapi, yang merupakan pusat pemerintahan dan ibukota Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada relevansi langsung wilayah tersebut terhadap objek penelitian, serta adanya akses terhadap sumber

data yang dibutuhkan. Peneliti melakukan pengumpulan data di sejumlah institusi resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Kantor Bappeda Rokan Hilir, serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Waktu pelaksanaan penelitian dimulai setelah diterbitkannya Surat Keputusan resmi dari Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung terhadap objek fisik pembangunan serta wawancara dengan narasumber utama, seperti pejabat dinas terkait dan masyarakat yang mengalami langsung dampak pembangunan pada masa Bupati H. Annas Maamun. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku-buku sejarah, arsip pemerintah, dokumentasi foto, catatan resmi pembangunan, serta artikel ilmiah dan media massa yang relevan dengan topik penelitian.

Pengumpulan data dilakukan dengan empat teknik utama: observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Observasi dilakukan secara langsung ke kawasan Batu Enam yang menjadi pusat pemerintahan baru dan lokasi pembangunan penting selama masa kepemimpinan Bupati Annas Maamun. Wawancara dilakukan dengan metode semi-terstruktur kepada kepala dinas yang menjabat pada masa itu, serta masyarakat yang menjadi saksi atau penerima dampak langsung dari kebijakan pembangunan. Dokumentasi berupa foto, laporan pembangunan, dan arsip daerah dikumpulkan sebagai bukti visual dan administratif. Studi pustaka digunakan untuk memperkuat konteks historis dengan merujuk pada referensi-referensi tertulis yang relevan. Dalam hal instrumen penelitian, pendekatan kualitatif mengharuskan peneliti sebagai instrumen utama. Namun demikian, peneliti juga menyusun panduan observasi, panduan wawancara, dan format dokumentasi untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sesuai dengan fokus penelitian. Pedoman wawancara divalidasi terlebih dahulu oleh dosen pembimbing sebagai bentuk uji kelayakan instrumen. Jika ditemukan kendala komunikasi dalam proses wawancara, peneliti mengambil langkah alternatif seperti bantuan penerjemah lokal.

Analisis data dilakukan melalui empat tahap penelitian sejarah menurut Dudung Abdurrahman, yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi (Fetra Yurita, 2014). Tahap heuristik dilakukan untuk mengumpulkan sumber sejarah baik tertulis maupun lisan. Verifikasi mencakup kritik ekstern untuk menguji keaslian sumber dan kritik intern untuk menilai kredibilitas isi sumber. Tahap interpretasi dilakukan untuk memahami dan menafsirkan fakta yang ditemukan secara analitis dan sintesis, sedangkan historiografi menjadi tahap akhir berupa penulisan naratif dari hasil interpretasi fakta sejarah. Keabsahan data dalam penelitian ini diuji melalui metode triangulasi dan member-check. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai sumber untuk menemukan konsistensi informasi. Member-check dilakukan dengan mengkonfirmasi ulang data hasil wawancara kepada narasumber untuk menghindari salah tafsir dan bias persepsi. Dengan demikian, validitas data terjaga dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun prosedur penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: (1) pengumpulan data mengenai perkembangan pembangunan Kabupaten Rokan Hilir melalui observasi dan wawancara; (2) pengorganisasian dan translasi data hasil wawancara dan observasi; (3) analisis terhadap data yang telah diperoleh; dan (4) penyusunan deskripsi hasil penelitian dalam bentuk laporan ilmiah. Seluruh proses dilaksanakan secara sistematis dan sesuai dengan standar metode penelitian sejarah yang berlaku.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kondisi Kabupaten Rokan Hilir Sebelum Masa Kepemimpinan Bupati H. Annas Maamun

Sebelum kepemimpinan Bupati H. Annas Maamun, Kabupaten Rokan Hilir baru terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999. Wilayah ini masih sangat

bergantung pada struktur administratif lama peninggalan Kabupaten Bengkalis. Infrastruktur pemerintahan belum memadai, dan proses pembangunan masih terbatas pada perencanaan jangka pendek berdasarkan PROPERDA Tahun 2001–2005.

Tabel 1. Nama-nama Pejabat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2002

No	Jabatan	Nama Pejabat
1	Bupati	Drs. H. Thamrin Hasyim
2	Wakil Bupati	H. Ilyas RB, BE
3	Camat Tanah Putih	Drs. Syahrial
4	Camat Pujud	Jasrianto, S.Sos
5	Camat Tanah Putih Tanjung Melawan	Muhammad zen
6	Camat Bagan Sinembah	Suyatno, AMP
7	Camat Simpang Kanan	H. Syahrin Yunan
8	Camat Kubu	Rahmatul Zamri, S.Sos
9	Camat Bangko	Wazirman Yunus, S.Sos
10	Camat Sinaboi	H.M Arsyad, SH
11	Camat Rimba Melintang	M. Rusli Syarif, S.Sos
12	Camat Bangko Pusako	Jon Syarifdow

Pada tahun 2004–2005, pertumbuhan ekonomi di Rokan Hilir cukup stabil dengan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai penopang utama. Pada tahun 2005, sektor ini menyumbang sebesar Rp1.597.422 juta terhadap PDRB. Sementara itu, sektor listrik, gas, dan air minum memiliki kontribusi paling kecil. Sumber daya alam yang melimpah terutama dalam bentuk lahan dan hasil perkebunan menjadi kekuatan ekonomi utama. Pada tahun 2005, luas lahan pertanian dan perkebunan mencapai lebih dari 47% dari total luas wilayah. Kemudian pada aspek pendidikan, pada tahun ajaran 2005/2006, jumlah total sekolah di Kabupaten Rokan Hilir mencapai 487 unit. Sekolah terbanyak berada di Kecamatan Bagan Sinembah dengan 100 sekolah. Namun, distribusi lembaga pendidikan belum merata, terutama di wilayah pesisir dan pedalaman. Sedangkan jumlah guru terbanyak berasal dari jenjang SD, yakni 3.200 orang atau 63,25% dari total. Jumlah siswa terbanyak tercatat di tingkat SD dengan 72.819 murid, disusul SLTP dan SLTA. Selanjutnya, pada aspek social dan budaya, dapat dilihat dari peningkatan aktivitas lintas etnis, terutama dalam hal pelestarian tradisi lokal. Salah satu perayaan budaya yang paling menonjol adalah Bakar Tongkang. Perayaan ini menjadi ikon budaya tahunan yang tidak hanya dihadiri oleh warga etnis Tionghoa, tetapi juga masyarakat umum dan wisatawan domestik. Pada tahun 2005, jumlah kader sosial mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tercatat 541 kader umum, 223 kader gizi, dan 1.057 kader kesehatan aktif dalam program kemasyarakatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan warga Tionghoa menyebutkan bahwa setelah 2006, pemerintah daerah memberikan perhatian lebih terhadap pelestarian budaya mereka. Pemerintah juga mulai memfasilitasi kegiatan budaya tersebut sebagai daya tarik pariwisata yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Perkembangan Kabupaten Rokan Hilir Masa Kepemimpinan Bupati H. Annas Maamun

Pada periode pertama pemerintahan Bupati H. Annas Maamun (2006–2011), pembangunan difokuskan pada penguatan infrastruktur pemerintahan. Kawasan Batu Enam dikembangkan sebagai pusat pemerintahan terpadu. Sebanyak 11 bangunan perkantoran dan 9 gedung layanan publik dibangun di atas lahan rawa seluas 500 hektar. Gedung-gedung tersebut, termasuk kantor bupati, DPRD, RSUD, dan sekolah polisi negara, dirancang menggunakan arsitektur berkubah putih yang mencirikan identitas visual “Negeri Seribu Kubah”. Pertumbuhan ekonomi Rokan Hilir sepanjang dua periode jabatan Bupati H. Annas

Maamun menunjukkan peningkatan signifikan. Sektor utama yang menopang ekonomi daerah adalah pertanian, kehutanan, perikanan, dan pertambangan. Berdasarkan wawancara dengan pejabat daerah, sektor perkebunan kelapa sawit dan karet menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat, selain pertambangan minyak dan gas. Dapat kita lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. PDRB Kabupaten Rokan Hilir Menurut Lapangan Usaha (2012-2014)

No	Lapangan Usaha	2012	2013	2014
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	14.579.016,6	15.715.859	18.288.295
2	Pertambangan dan Pengalihan	32.852.387	36.589.908	42.140.579
3	Industri pengolahan	8.192,79	9.187.091,2	9.983,094
4	Listrik, Gas dan Air minum	74,9	81,2	88,65
5	Bangunan	377.342,69	453.243,24	528.108
6	Perdagangan, hotel dan restoran	1.766,60	1.914,10	1.993
7	Pengangkutan dan komunikasi	155,30	170,80	185,78
8	Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	244,2	262,3	378,141
9	Jasa lainnya	410,7	434,4	444,91
	PDRB	47.818.706,38	61.948.016,01	71.408.865,2

Sektor pertambangan menjadi kontributor terbesar terhadap PDRB tahun 2014. Sementara itu, sektor listrik, gas, dan air minum mencatat kontribusi terkecil selama dua periode pemerintahan. Kemudian pada aspek pendidikan, dimana terdapat peningkatan jumlah sekolah berlangsung cukup pesat, namun distribusinya belum merata. Sekolah lebih banyak terkonsentrasi di wilayah kota, sedangkan desa-desa masih kekurangan akses pendidikan. Pada tahun ajaran 2011/2012 terdapat 901 sekolah, dengan dominasi jenjang pendidikan dasar. Untuk TK berjumlah 217 unit, SD berjumlah 402 unit, SMP berjumlah 177 unit, dan SMA berjumlah 105 unit. Angka melek huruf Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2012 masih berada di bawah rata-rata Provinsi Riau, yaitu 98,18 dengan rata-rata lama sekolah 7,90 tahun. Sebagian besar penduduk menyelesaikan pendidikan hanya sampai jenjang SLTP. Selanjutnya perkembangan pada aspek social dan budaya, dimana Pemerintahan Bupati Annas Maamun turut mendorong integrasi sosial lintas etnis. Salah satu dampaknya adalah berkembangnya Perayaan Bakar Tongkang dari ritual komunitas menjadi festival budaya berskala nasional. Pemerintah menyediakan lahan khusus untuk pelaksanaan acara ini sejak tahun 2007. Wawancara dengan pengurus kelenteng dan masyarakat etnis Tionghoa menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam sikap masyarakat Melayu terhadap acara tersebut. Masyarakat mulai berpartisipasi dan bergotong-royong menyukseskan kegiatan. Hubungan antar-etnis menjadi lebih terbuka dan harmonis, tercermin dari keterlibatan bersama dalam kegiatan keagamaan, sosial, dan budaya.

Dampak Perkembangan Kabupaten Rokan Hilir pada Kehidupan Masyarakat

Pembangunan Kabupaten Rokan Hilir pada masa Bupati H. Annas Maamun memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat. Pembangunan kawasan pusat pemerintahan Batu Enam yang sebelumnya merupakan wilayah hutan rawa, telah disulap menjadi sentra aktivitas ekonomi dan perdagangan. Warga sekitar memanfaatkan peluang dengan membuka usaha kecil seperti warung, toko kelontong, dan jasa makanan. Salah seorang pedagang di kawasan tersebut, Zuhendri, menyatakan bahwa pembangunan Batu Enam memberikan penghidupan baru bagi keluarganya. Ia menyebutkan bahwa aktivitas masyarakat meningkat sejak kawasan tersebut mulai berfungsi sebagai pusat pemerintahan. Pemerataan pembangunan infrastruktur seperti jalan desa, pengaspalan ruas

utama, dan saluran irigasi juga memberikan akses yang lebih baik bagi masyarakat desa ke pusat ekonomi kecamatan. Hal ini mempercepat distribusi barang hasil pertanian dan memudahkan akses terhadap pasar. Kemudian perkembangan kabupaten Rokan Hilir juga memberikan dampak yang signifikan pada aspek pendidikan, dimana jumlah sekolah di Rokan Hilir terus bertambah dari tahun ke tahun. Data tahun 2024 mencatat terdapat 606 sekolah yang tersebar di seluruh kecamatan. Ketersediaan guru juga mengalami peningkatan, dengan rasio murid-guru yang telah sesuai dengan standar nasional. Dapat dilihat pada tabel yang disajikan berikut:

Tabel 3. Rasio Murid dan Guru di Rokan Hilir

No	Tingkatan sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid-Guru
1	SD	80.968	5.041	16,06
2	SMP	23.028	1.832	12,57
3	SMA	20.498	1.139	14,74
5	SMK	6.626	531	12,48

Salah seorang guru di sungai Panji-panji, Kecamatan Kubu Babussalam bernama Ibu Nursiah menyatakan bahwa pembangunan sekolah yang semakin merata mendorong keinginannya untuk mengajar di daerah terpencil, meskipun latar belakang pendidikannya bukan dari jurusan pendidikan. Selain sarana fisik, pemerintah daerah juga mendukung peningkatan sumber daya manusia dengan membuka formasi guru setiap tahun, termasuk guru mata pelajaran umum dan kejuruan. Selanjutnya, aspek social, dimana kehidupan sosial masyarakat Rokan Hilir ditandai oleh keberagaman suku, etnis, dan agama. Etnis Melayu sebagai penduduk mayoritas hidup berdampingan dengan komunitas Tionghoa, Batak, Jawa, Bugis, dan Nias. Pemerintah daerah mengambil langkah strategis untuk merawat harmoni sosial, khususnya antara etnis Melayu dan Tionghoa. Perayaan Bakar Tongkang, yang dahulu hanya dirayakan secara terbatas oleh komunitas Tionghoa, kini telah menjadi perayaan budaya bersama masyarakat Rokan Hilir. Tradisi ini disambut baik oleh warga dari berbagai latar belakang dan menjadi agenda wisata tahunan yang dihadiri ribuan pengunjung. Berdasarkan wawancara bersama Oliong, salah seorang warga etnis Tionghoa, menyatakan bahwa kondisi sosial saat ini jauh lebih baik dibanding masa lalu. Ia menyebutkan bahwa masyarakat Tionghoa kini dapat menjalankan ibadah dengan nyaman dan merasa dilibatkan dalam kehidupan sosial masyarakat secara umum. Kehidupan sosial yang inklusif tercermin dalam partisipasi masyarakat lintas etnis dalam kegiatan gotong royong, perayaan hari besar keagamaan, dan kegiatan kemasyarakatan lainnya. Proses asimilasi yang berjalan melalui pertemanan, pekerjaan, dan pendidikan semakin memperkuat ikatan sosial di antara masyarakat.

Pembahasan

Data yang disajikan dalam penelitian ini telah diolah dalam bentuk tabel, dan narasi sistematis. Penyajian ini memudahkan pembaca memahami perubahan signifikan yang terjadi di Kabupaten Rokan Hilir pada masa kepemimpinan Bupati H. Annas Maamun. Temuan penting dalam penelitian ini antara lain adalah: (a) terbentuknya pusat pemerintahan Batu Enam sebagai simbol pembangunan terintegrasi; (b) pertumbuhan ekonomi yang didominasi oleh sektor pertanian dan pertambangan; (c) bertambahnya jumlah lembaga pendidikan dan tenaga pendidik meskipun tingkat melek huruf masih di bawah rata-rata provinsi; serta (d) penguatan kohesi sosial dan pelestarian budaya Tionghoa dalam skala publik melalui perayaan Bakar Tongkang. Seluruh temuan ini merupakan hasil dari observasi langsung, dokumentasi visual, dan wawancara yang dilakukan peneliti di lapangan.

Secara teoritis, pembangunan daerah mencakup aspek ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya yang saling terkait dalam kerangka otonomi daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan pembangunan Bupati Annas Maamun berpijak pada prinsip pemberdayaan wilayah berbasis sumber daya lokal. Hal ini sejalan dengan teori pembangunan partisipatif yang menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan (Manghayu, A, 2018). Dalam konteks ekonomi, pembangunan kawasan Batu Enam menciptakan pusat gravitasi ekonomi baru di Bagansiapiapi, mendiversifikasi lapangan usaha masyarakat dan meningkatkan mobilitas sosial. Hal ini sesuai dengan gagasan Putnam (2000) dalam (Setyaningrum, Y, dkk. 2022) mengenai pentingnya modal sosial dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam bidang pendidikan, pembangunan sekolah dan perekrutan tenaga pengajar merupakan langkah nyata dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, keterbatasan akses pendidikan di wilayah pedesaan dan rendahnya rata-rata lama sekolah menunjukkan adanya ketimpangan distribusi pendidikan. Temuan ini mendukung analisis dari Kuncoro (2013) yang menyatakan bahwa pembangunan pendidikan harus disertai dengan perencanaan pemerataan akses (Kristiniawati, A, dkk. 2018)

Pada bidang sosial budaya, transformasi perayaan Bakar Tongkang menjadi event publik menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keragaman budaya sebagai kekuatan pembangunan. Hal ini menjadi contoh konkret dari penerapan konsep multikulturalisme yang menekankan harmoni dalam keberagaman (Siregar.R.H, 2015). Penerimaan masyarakat Melayu terhadap kegiatan budaya Tionghoa menandakan keberhasilan strategi kebudayaan pemerintah daerah dalam memperkuat integrasi sosial. Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil studi Afriyana, L, dkk (2023) yang menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur yang terencana dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah baru hasil pemekaran. Selain itu, penelitian oleh Nurindah Sari (2024) ga menemukan bahwa pelibatan budaya lokal dalam pembangunan meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap daerahnya. Perbedaan muncul pada objek dan lingkup pembangunan. Penelitian sebelumnya lebih fokus pada pembangunan fisik atau pendidikan secara terpisah, sementara penelitian ini memadukan ketiganya secara menyeluruh dalam satu kesatuan analisis pemerintahan. Secara praktis, penelitian ini menghasilkan kebaruan dalam bentuk dokumentasi historis pembangunan Kabupaten Rokan Hilir dari sudut pandang kepemimpinan daerah dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Dari sudut pandang teoritis, penelitian ini menunjukkan bagaimana sebuah daerah baru dapat membentuk identitasnya sendiri melalui kebijakan pembangunan yang menyatukan aspek ekonomi, sosial, dan budaya secara harmonis.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan Kabupaten Rokan Hilir selama masa kepemimpinan Bupati H. Annas Maamun (2006–2014) mengalami perkembangan yang signifikan pada tiga aspek utama, yakni ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya. Pembangunan fisik yang terfokus di kawasan Batu Enam berhasil mengubah wajah pusat pemerintahan menjadi lebih representatif dan sekaligus menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi lokal. Selain itu, peningkatan jumlah sekolah dan rasio guru yang ideal telah menunjukkan komitmen dalam pengembangan sumber daya manusia, meskipun masih terdapat ketimpangan distribusi pendidikan di wilayah pedesaan. Pada aspek sosial budaya, keberhasilan integrasi masyarakat multietnis, terutama dalam menjadikan perayaan Bakar Tongkang sebagai acara budaya lintas etnis dan berskala nasional, menunjukkan kuatnya nilai kohesi sosial yang dibangun oleh pemerintahan setempat. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal cakupan waktu dan keterbatasan dokumentasi visual pada

beberapa tahun awal pemerintahan. Selain itu, tidak semua sektor pembangunan dapat dijangkau secara menyeluruh karena keterbatasan data arsip dan waktu observasi lapangan. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan kajian lanjutan yang lebih mendalam dengan cakupan waktu yang lebih luas dan pelibatan sektor lain seperti kesehatan dan lingkungan hidup, serta penggunaan pendekatan kuantitatif untuk mengukur dampak pembangunan secara statistik. Penulis menyampaikan terima kasih kepada dosen pembimbing atas bimbingan dan arahnya selama proses penelitian ini, serta kepada seluruh pihak di Kabupaten Rokan Hilir yang telah bersedia menjadi narasumber dan memberikan akses data yang dibutuhkan. Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan studi sejarah lokal dan perencanaan pembangunan daerah ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriyana. L. dkk. (2023). Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016-2021. *Jurnal Homepage*, 5(1): 1-12
- Aprian, dkk. (2022). Negeri Seribu Kubah: Identitas Arsitektur Rokan Hilir dan Pengaruh Selera Penguasa pada Era Pasca Reformasi. *Jurnal Lingkungan Binaan Indonesia*, 11(3)
- Manghayu. A. (2018). Perencanaan Pembangunan Partisipatif Dalam Penerapan E-Musrenbang. *Jurnal Manajemen Pembangunan* 5(2): 95-115
- Mulyo. S.S, dkk. (2018). *Proyek Infrastruktur dan Sengketa Konstruksi*. Depok: Prenedamedia Group
- Nurindah Sari. (2024). Problematika Pembangunan Masyarakat Nelayan (Studi Keadaan Pendidikan, Ekonomi Dan Hubungan Sosial Masyarakat Di Pesisir Pantai Galesong Selatan Kabupaten Takalar). *Tesis: Universitas Muhammadiyah Makassar*
- Setyaningrum. Y, dkk. (2022). Pemanfaatan Modal Sosial Sebagai Coping Strategy (Studi Kasus Seniman Pasar Seni Ancol Masa Pandemi Covid-19). *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 48(1): 1-16
- Siregar. R.H. (2015). Pendidikan Multikulturalisme: Mengikis Sikap Radikalisme, Rasisime, dan Diskriminisme. *Jurnal Madania*, 5(2): 152- 176
- Suprpto. (2013). *Metodologi Ilmu Pendidikan dan Ilmu-Ilmu Pengetahuan Sosial*. Jakarta: PT. Buku Seru
- Yurita Fetra. (2014). Sejarah “Lubang Jepang “ Sebagai Tempat Perlindungan Sekutu di Bukit Tinggi Tahun 1942-1945. *Skripsi: Universitas Riau*